

Pelatihan Calon Pengurus, Pengawas, dan Manajer Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu, Mojokerto

Training for Prospective Administrators, Supervisors, and Managers of the Red and White Cooperative in Dlanggu Village, Mojokerto

Muhammad Taufiq Hidayat^{1*}, Nur Samsi²

¹Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

²STIE NU Trate Gresik, Indonesia

*Penulis korespondensi: taufikhidayat@untag-sby.ac.id

Article History:

Naskah Masuk: 15 Agustus 2025;

Revisi: 30 September 2025;

Diterima: 22 Oktober 2025;

Terbit: 31 Oktober 2025.

Keywords: cooperative training; cooperative governance; social capital; community empowerment; community participation.

Abstract. Cooperatives play a strategic role in strengthening the community economy based on participation and family principles. In Dlanggu Village, Mojokerto Regency, cooperative institutions have not developed optimally due to managerial limitations and understanding of governance. This activity aims to increase the capacity of prospective administrators, supervisors, and managers of the Red and White Cooperative through competency-based training and participatory mentoring. The research used a descriptive qualitative approach with a participatory method, involving 15 participants from the community, MSME actors, and village officials. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and questionnaires before and after training, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña models through data reduction, presentation, triangulation, and conclusion drawn. The results showed a significant increase in the managerial competence of the participants, especially in the aspects of governance, financial administration, and the application of the principles of Good Cooperative Governance (GCG). Participants understand the importance of transparency, accountability, and independence in cooperative management. In addition to technical improvements, this training strengthens social bonding, collective responsibility, and community social capital. Synergy between members, administrators, and supervisors has been proven to increase the trust and effectiveness of cooperative institutions. This program is a model for strengthening capacity based on community participation that can be replicated in other villages.

Abstrak

Koperasi berperan strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis partisipasi dan prinsip kekeluargaan. Di Desa Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, kelembagaan koperasi belum berkembang optimal karena keterbatasan manajerial dan pemahaman tata kelola. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas calon pengurus, pengawas, dan manajer Koperasi Merah Putih melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pendampingan partisipatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif, melibatkan 15 peserta dari masyarakat, pelaku UMKM, dan perangkat desa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner sebelum dan sesudah pelatihan, lalu dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam kompetensi manajerial peserta, terutama pada aspek tata kelola, administrasi keuangan, dan penerapan prinsip Good Cooperative Governance (GCG). Peserta memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam pengelolaan koperasi. Selain peningkatan teknis, pelatihan ini memperkuat social bonding, tanggung jawab kolektif, serta modal sosial masyarakat. Sinergi antara anggota, pengurus, dan pengawas terbukti meningkatkan kepercayaan dan efektivitas kelembagaan koperasi. Program ini menjadi model penguatan kapasitas berbasis partisipasi masyarakat yang dapat direplikasi di desa lain.

Kata Kunci: pelatihan koperasi; tata kelola koperasi; modal sosial; pemberdayaan masyarakat; partisipasi masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang didirikan atas dasar keanggotaan dan prinsip kekeluargaan memiliki peran penting dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya terdiri dari individu atau badan hukum koperasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip koperasi dan berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat (UU No. 25/1992, Pasal 1) (Republik Indonesia, 1992). Koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat luas, sekaligus memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi pilar utama perekonomian nasional (Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Di Desa Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sektor pertanian dan usaha kecil menengah menjadi pilar utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi belum berkembang maksimal karena belum ada manajemen yang terorganisir dengan baik dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dosen dan tim melaporkan telah memberikan pendampingan kepada koperasi desa melalui pelatihan manajemen organisasi dan penggunaan software akuntansi, karena koperasi wanita mitra masih menggunakan sistem manual dan belum memahami secara lengkap peran dalam struktur organisasi (Smartklik, 2023).

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kapasitas calon pengurus, pengawas, dan manajer koperasi di desa dalam menguasai tata kelola, administrasi, keuangan, dan pengawasan internal. Kekurangan pemahaman ini berpotensi menimbulkan konflik internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta penyimpangan dalam manajemen. Sebagaimana terlihat dalam pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk koperasi wanita di Surabaya, salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan kemampuan pengurus dalam hal kinerja dan kepercayaan dari anggota (Warta17, 2021). Sebagai langkah penyelesaian, pelatihan berbasis kompetensi disiapkan untuk calon pengurus, pengawas, dan manajer koperasi Merah Putih di Desa Dlanggu. Materi yang diajarkan meliputi prinsip koperasi, administrasi organisasi, manajemen keuangan, audit internal, serta pemasaran koperasi yang berfokus pada anggota. Dalam pengembangan modul koperasi, FGD yang dilakukan oleh dosen FISIP Untag Surabaya menghasilkan modul kewirausahaan koperasi dengan materi manajemen dan tata kelola koperasi sebagai upaya memperkuat struktur kelembagaan (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017). Dengan kombinasi pelatihan dan pendampingan secara intensif, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari.

Program pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan calon pengurus, pengawas, dan manajer koperasi Merah Putih Desa Dlanggu dalam menjalankan tugas administratif, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yang efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta pengelola koperasi yang memiliki sertifikasi serta mendapatkan kepercayaan dari anggota. Langkah ini juga bertujuan untuk mengurangi berbagai potensi masalah kelembagaan dan mendukung pengembangan koperasi Merah Putih menjadi institusi ekonomi desa yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Pelatihan dan pendampingan koperasi Merah Putih di Desa Dlanggu diharapkan menjadikan koperasi tersebut lebih dari sekadar lembaga simpan-pinjam, tetapi berkembang menjadi pusat usaha produktif yang mendukung pemberdayaan ekonomi anggotanya. Keberhasilan program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam memperkuat koperasi berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini akan melakukan evaluasi terhadap perubahan kemampuan peserta sebelum dan setelah pelatihan serta mengkaji efektivitas kelembagaan koperasi setelah dilakukan intervensi.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia koperasi, khususnya untuk calon pengurus, pengawas, dan manajer koperasi Merah Putih Desa Dlanggu. Evaluasi diarahkan pada perubahan kompetensi peserta serta penerapan tata kelola koperasi dalam rentang waktu tertentu. Pendekatan penelitian lebih menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajerial tanpa melibatkan intervensi pembiayaan eksternal atau modal secara langsung.

2. KAJIAN TEORITIS

Koperasi merupakan bentuk kelembagaan ekonomi berbasis anggota yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan, solidaritas, dan demokrasi ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh International Cooperative Alliance (ICA), koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kepemilikan bersama dan pengelolaan demokratis. Dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat desa, koperasi berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan modal sosial masyarakat (H. Herdiyanti, 2024)

Teori Modal Sosial (*Social Capital Theory*)

Teori Modal Sosial menekankan pentingnya jejaring sosial (*social networks*), kepercayaan (*trust*), dan norma kerja sama (*reciprocity norms*) dalam meningkatkan efektivitas organisasi dan pembangunan komunitas. Dalam pengelolaan koperasi, modal sosial menjadi dasar terbentuknya kepercayaan antar anggota dan solidaritas sosial. Menurut Tjahjono et al.,

(2022), tingkat kepercayaan dan keterlibatan sosial antar anggota koperasi berpengaruh positif terhadap otonomi dan kinerja kelembagaan koperasi. Dengan demikian, modal sosial merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan kredibilitas koperasi berbasis komunitas.

Teori Penguatan Kapasitas (*Capacity Building Theory*)

Teori ini menjelaskan proses peningkatan kemampuan individu, organisasi, dan sistem sosial agar mampu mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan (Morgan, 2006). Dalam konteks koperasi, *capacity building* diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan tata kelola yang profesional. Pradana et al, (2023) menegaskan bahwa pendekatan *capacity building* dalam pelatihan masyarakat pedesaan efektif meningkatkan kemampuan kelembagaan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Oleh karena itu, pelatihan calon pengurus dan pengawas koperasi merupakan implementasi nyata dari teori ini dalam konteks pengembangan organisasi berbasis komunitas.

Good Cooperative Governance (GCG)

Konsep *Good Cooperative Governance (GCG)* merupakan adaptasi dari prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan pada koperasi dengan menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness). Dasuki et al, (2019) menyatakan bahwa penerapan GCG pada koperasi mampu meningkatkan efisiensi operasional, kepercayaan anggota, dan kinerja keuangan. Dalam pelatihan Koperasi Merah Putih, prinsip GCG menjadi materi utama untuk memastikan pengurus dan pengawas mampu mengelola koperasi secara profesional, demokratis, dan sesuai dengan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pemberdayaan Masyarakat (*Community Empowerment*)

Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang memberikan kapasitas, akses, dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengontrol sumber daya dan keputusan yang memengaruhi kehidupannya (Chambers, 1997). Sururi & Hasanah, (2025) menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan kapasitas sosial dan ekonomi desa, termasuk melalui koperasi desa. Pelatihan koperasi yang partisipatif mendukung terciptanya kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Keterkaitan Antar Konsep

Sinergi antara teori modal sosial, penguatan kapasitas, GCG, dan pemberdayaan masyarakat membentuk kerangka teoritis yang komprehensif untuk memahami efektivitas pelatihan koperasi berbasis partisipatif. Modal sosial menciptakan kepercayaan dan jaringan

kerja sama, penguatan kapasitas meningkatkan kompetensi manajerial, GCG memastikan tata kelola profesional, sedangkan pemberdayaan masyarakat memperluas dampak sosial ekonomi di tingkat desa. Keempat teori ini saling melengkapi dan menjadi dasar konseptual bagi penelitian serta kegiatan pelatihan koperasi di Desa Dlanggu, Mojokerto.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode partisipatif (Istanti et al., 2023) karena pelaksanaan kegiatan melibatkan interaksi langsung antara tim KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan masyarakat Desa Dlanggu. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi calon pengurus, pengawas, dan manajer Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu, Mojokerto. Metode partisipatif ini memungkinkan masyarakat berperan tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan (Hidayat & Maqsudi, 2022; Moleong, 2019).

Penelitian berlangsung di Balai Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, selama 12 hari, tepatnya pada tanggal 13–24 Juli 2025. Subjek penelitian terdiri dari 15 peserta pelatihan yang mewakili masyarakat, pelaku UMKM, dan perangkat desa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta kuesioner sederhana untuk mengevaluasi pemahaman peserta sebelum dan setelah pelatihan. (Sugiyono, 2022) menyatakan, validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode agar temuan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses analisis data mengikuti model Miles, Huberman, and Saldaña (2018) yang terdiri dari empat tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, triangulasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengukur efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi manajerial calon pengurus dan pengawas koperasi. Keberhasilan program dinilai berdasarkan peningkatan pengetahuan peserta serta terbentuknya struktur organisasi koperasi yang siap beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan (Hidayat & Maqsudi, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Merah Putih adalah badan usaha milik masyarakat desa yang didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama secara kolektif. Berdasarkan informasi resmi dari merahputih.kop.id, anggota koperasi ini berasal dari warga desa dan pengurusnya dipilih secara profesional melalui Musyawarah Desa Khusus tanpa melibatkan aparat desa. Koperasi ini merupakan implementasi nyata kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa

melalui pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan kelembagaan ekonomi. Pelatihan untuk calon pengurus, pengawas, dan manajer Koperasi Merah Putih Desa dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip, struktur organisasi, dan operasional koperasi yang modern. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa mayoritas peserta sangat antusias dalam mempelajari peran dan fungsi masing-masing, terutama dalam pengelolaan usaha, akuntabilitas keuangan, serta tata kelola yang transparan dan profesional.

Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional pembentukan 80.000 koperasi desa dan kelurahan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mempercepat pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar pengelolaan kelembagaan dan usaha di tingkat desa dapat dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota. Peserta pelatihan dipilih dari masyarakat desa melalui Musyawarah Desa Khusus dan bukan dari unsur pejabat desa. Materi pelatihan mencakup prinsip tata kelola, manajemen koperasi, serta strategi bisnis koperasi modern yang berbasis komunitas (Undang-undang No. 9 Tahun 2025).

Program pelatihan Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu dirancang untuk meningkatkan kompetensi calon pengurus, pengawas, dan manajer koperasi dalam bidang tata kelola, administrasi, keuangan, dan audit internal. Materi pelatihan juga mencakup strategi pemasaran koperasi berbasis anggota dan pendampingan berkelanjutan agar hasil pelatihan dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan koperasi. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemampuan teknis, tetapi juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan sosial, profesionalitas, serta kepercayaan antaranggota. Berdasarkan (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2017), pendekatan berbasis kompetensi dan focus group discussion terbukti efektif dalam memperkuat kapasitas manajerial dan tata kelola koperasi berbasis prinsip Good Cooperative Governance (GCG).

Penelitian ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia koperasi, dengan mengevaluasi perubahan kompetensi peserta sebelum dan sesudah pelatihan, serta penerapan hasil pelatihan dalam kegiatan operasional koperasi. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan berupa waktu pelaksanaan yang singkat (12 hari) dan jumlah peserta yang terbatas (15 orang), hasilnya menunjukkan gambaran awal yang penting tentang efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dan manajerial koperasi di tingkat desa.



Gambar 1. Kolaborasi Pelatihan Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu, Mojokerto bersama KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pelatihan Koperasi Merah Putih di Desa Dlanggu, Mojokerto menyajikan beberapa materi dari berbagai pemateri, dengan rincian sebagai berikut:

Table 1. Materi Pelatihan Koperasi Merah Putih.

No.	Materi Pelatihan	Instruktur
1	Pelatihan Koperasi Merah Putih	Dr. M. Taufiq Hidayat, SE.MM
2	Prinsip Tata Kelola Koperasi yang Baik	Dr. M. Taufiq Hidayat, SE.MM
3	Penerapan Tata Kelola Koperasi Merah Putih	Dr. H. Nur Samsi, SE., MM., MSA., Ak., CA

Pelatihan Koperasi Merah Putih

Pembentukan Koperasi Merah Putih didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Satuan Tugas tersebut bertugas mengoordinasikan pendampingan dalam aspek kelembagaan, usaha, serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 menugaskan kepada 13 menteri, 3 kepala badan, serta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan dukungan penguatan kelembagaan dan permodalan koperasi desa (Indonesia., 2025). Dalam konteks teori, proses pembentukan koperasi ini mencerminkan Modal Sosial (*Social Capital*

Theory), di mana kepercayaan (*trust*), jaringan sosial, dan norma kerja sama menjadi fondasi penguatan kelembagaan. Menurut Tjahjono et al. (2022), keberhasilan otonomi koperasi multipihak di Jawa Timur bergantung pada hubungan sosial yang kuat antaranggota serta kepercayaan terhadap struktur kelembagaan. Pelatihan yang dilakukan di Desa Dlanggu menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dan memperkuat solidaritas sosial sebagai dasar keberlanjutan koperasi.

Pelatihan pembentukan dan penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu dilaksanakan selama 12 hari, di Balai Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta pelatihan yang terdiri dari unsur masyarakat umum, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta perangkat desa. Para peserta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk memastikan bahwa struktur pengurus dan pengawas koperasi berasal dari unsur masyarakat dan bukan dari aparatur pemerintahan desa. Pelatihan difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi manajerial, serta pemahaman terhadap tata kelola koperasi modern yang profesional dan akuntabel.



Gambar 2. Penyampaian Materi Koperasi Merah Putih.

Dalam konteks teori, proses pembentukan koperasi ini mencerminkan Modal Sosial (*Social Capital Theory*), di mana kepercayaan (*trust*), jaringan sosial, dan norma kerja sama menjadi fondasi dalam memperkuat kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat (N. Herdiyanti, 2024). Menurut Tjahjono et al. (2022), keberhasilan otonomi koperasi multipihak di Jawa Timur sangat bergantung pada kekuatan hubungan sosial antaranggota dan tingkat kepercayaan terhadap struktur organisasi. Hal ini tampak dalam pelatihan di Desa Dlanggu yang mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama serta memperkuat solidaritas sosial sebagai dasar keberlanjutan koperasi. Strategi pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu dilakukan melalui tiga pendekatan utama:

Pembentukan koperasi baru, bagi desa yang belum memiliki lembaga koperasi, dengan dasar kesepakatan masyarakat melalui musyawarah

Pengembangan koperasi yang sudah ada, melalui penyesuaian anggaran dasar, nama, dan program kerja sesuai kebutuhan lokal

Revitalisasi koperasi tidak aktif, dengan memberikan pendampingan dan penyelenggaraan rapat anggota guna mengaktifkan kembali kegiatan ekonomi masyarakat

Ketiga pendekatan ini sesuai dengan Penguatan Kapasitas (*Capacity Building Theory*) yang menitikberatkan pada pengembangan kemampuan kelembagaan, sistem organisasi, serta sumber daya manusia (Pradana et al., 2023). Revitalisasi koperasi lama mencerminkan penerapan konsep *capacity sustainability*, di mana lembaga yang sebelumnya lemah diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan intensif berbasis kebutuhan lokal. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai koperasi multi pihak (*multi-stakeholder cooperative*) yang mengelola berbagai unit ekonomi strategis, seperti gerai sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik desa, dan fasilitas *cold storage*. Model bisnis ini merupakan implementasi dari Teori Modal Sosial, karena memungkinkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan seperti petani, pelaku UMKM, tenaga kesehatan, dan perangkat desa untuk membangun sistem ekonomi yang inklusif (Veritia & Arifianto, 2020). Kolaborasi lintas sektor tersebut memperkuat jaringan sosial, menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, serta meningkatkan daya tahan koperasi terhadap perubahan ekonomi desa.

Prinsip Tata Kelola Koperasi yang Baik

Perbedaan antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes Adalah dari fungsinya, meskipun keduanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa, koperasi berfokus pada kepemilikan bersama oleh anggota dan prinsip demokrasi ekonomi, sementara BUMDes merupakan badan usaha milik pemerintah desa. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih peran, serta agar koperasi tetap menjadi wadah partisipasi ekonomi masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan pandangan Pemberdayaan Masyarakat, yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi lokal (A. Sururi & Hasanah, 2022).

Penerapan *Good Cooperative Governance* (GCG) menjadi fokus penting dalam pelatihan. Dasuki & Lestari (2019) menegaskan bahwa tata kelola koperasi yang baik melibatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*) sebagai prinsip utama keberlanjutan organisasi. Prinsip-prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) yang disampaikan dalam materi meliputi:

Transparansi – koperasi wajib menyampaikan informasi yang relevan kepada anggota, termasuk laporan keuangan, hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan rencana strategis;
Akuntabilitas – setiap pelaku koperasi harus memiliki kompetensi dan tanggung jawab yang jelas;

Responsibilitas – pelaksanaan kegiatan koperasi harus sesuai peraturan perundangan seperti UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana lainnya;

Independensi – pengambilan keputusan harus bebas dari intervensi dan konflik kepentingan;

Kewajaran (Fairness) – seluruh anggota memiliki hak yang setara untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, serta menikmati hasil usaha secara adil.



Gambar 3. Penyampaian Materi *Good Corporate Governance* dan Sesi Tanya Jawab

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta memahami pentingnya keterbukaan informasi, pengambilan keputusan kolektif, serta pembagian hasil usaha yang adil sebagai bagian dari prinsip GCG. Penerapan prinsip GCG juga terbukti memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi. Wuryani (2020) menyatakan bahwa pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengawasan internal, dan laporan keuangan terbuka berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dan kredibilitas koperasi. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, pelatihan ini membentuk kesadaran akan pentingnya manajemen yang profesional dan berbasis nilai kejujuran sebagai pilar tata kelola modern.

Penerapan Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Penerapan tata kelola oleh anggota koperasi

Berdasarkan hasil pembelajaran, peserta memahami bahwa anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Mengacu pada (Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian), anggota memiliki kewenangan melalui Rapat Anggota untuk:

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar dan Kebijakan Umum;
- 2) Memilih dan memberhentikan pengurus serta pengawas;
- 3) Menetapkan rencana kerja dan anggaran;
- 4) Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus;
- 5) Menentukan pembagian hasil usaha;
- 6) Menyetujui penggabungan atau pembubaran koperasi.

Pelatihan menekankan hak anggota untuk memperoleh informasi, memberikan pendapat, serta meminta diadakannya rapat anggota. Adapun kewajiban anggota meliputi mematuhi Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART), berpartisipasi dalam kegiatan koperasi, serta menjaga semangat kekeluargaan. Dari hasil evaluasi, peserta menyadari bahwa partisipasi aktif anggota menjadi elemen penting dalam menjaga prinsip demokrasi ekonomi di koperasi.

Penerapan tata kelola oleh pengurus koperasi

Bagi pengurus koperasi, pelatihan menekankan pentingnya manajemen profesional dengan tugas utama meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja serta RAPBK koperasi;
- 2) Menyelenggarakan rapat pengurus secara berkala;
- 3) Menyusun laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban;
- 4) Memelihara daftar anggota, inventaris, dan aset koperasi;
- 5) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan.

Selain itu, fungsi pengurus mencakup pemberian pendidikan kepada anggota baru, pengambilan keputusan secara kolektif, dan menjaga integritas organisasi dengan menghindari konflik kepentingan. Pelatihan menyoroti prinsip transparansi dan akuntabilitas pengurus, yang diwujudkan melalui keterbukaan laporan keuangan, penyampaian hasil RAT, serta penerapan sistem informasi manajemen koperasi. Peserta pelatihan menilai bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar pengurus menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola.

Penerapan Tata Kelola oleh Pengawas

Dalam sesi pelatihan pengawasan koperasi, peserta mendapatkan pemahaman bahwa pengawas berperan memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan operasional koperasi. Tugas pengawas meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan koperasi;
- 2) Memeriksa dan menilai laporan keuangan;
- 3) Memastikan kesesuaian kegiatan koperasi dengan peraturan dan AD/ART;
- 4) Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada rapat anggota.

Prinsip GCG bagi pengawas meliputi transparansi dalam penyampaian hasil audit, akuntabilitas dalam pelaporan, serta independensi dalam pengambilan keputusan. Pelatihan menekankan bahwa fungsi pengawas tidak hanya bersifat kontrol, tetapi juga advisory, yakni memberikan masukan kepada pengurus dalam memperbaiki sistem pengendalian internal dan pelayanan kepada anggota.

Sinergi Antara Anggota, Pengurus, dan Pengawas

Skenario penerapan *Good Cooperative Governance* yang dibahas dalam pelatihan menunjukkan pentingnya hubungan sinergis antara ketiga unsur utama koperasi:

- 1) Anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi;
- 2) Pengurus sebagai pengelola yang menjalankan kegiatan operasional;
- 3) Pengawas sebagai pihak independen yang memastikan akuntabilitas dan kepatuhan.

Dari hasil diskusi kelompok, peserta memahami bahwa komunikasi efektif antar unsur koperasi menjadi syarat utama terciptanya tata kelola yang baik. Pelatihan juga menekankan pentingnya penyelenggaraan rapat rutin dan audit internal yang terbuka untuk menjaga kepercayaan serta mencegah penyimpangan.

Evaluasi pelatihan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kompetensi manajerial peserta, terutama dalam hal tata kelola, penyusunan rencana bisnis, serta pemahaman terhadap prinsip koperasi modern. Hal ini merupakan bukti nyata dari penerapan Penguatan Kapasitas (*Capacity Building Theory*) yang berorientasi pada peningkatan kemampuan individu dan kelembagaan untuk mencapai tujuan organisasi secara mandiri (Wulandari & Hidayat, 2021). Selain peningkatan teknis, pelatihan ini memperkuat modal sosial melalui terbentuknya jejaring antarwarga desa. Herdiyanti (2024) & Veritia & Arifianto (2020), *bonding social capital* memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi berbasis komunitas. Hubungan saling percaya dan kerja sama antar peserta menjadi pondasi pengembangan koperasi yang solid dan inklusif.

Secara keseluruhan, kegiatan pelatihan Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu memperlihatkan keterpaduan antara Pemberdayaan Masyarakat, Modal Sosial, Manajemen Koperasi, dan Penguatan Kapasitas. Sinergi membentuk model pemberdayaan ekonomi desa berbasis partisipasi, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor (Basbeth, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Beberapa kesimpulan dapat ditarik dari pelaksanaan pelatihan Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu, Mojokerto ini, meliputi:

Pelatihan Koperasi Merah Putih Desa Dlanggu efektif meningkatkan kapasitas manajerial, tata kelola, dan solidaritas anggota berbasis prinsip *Good Cooperative Governance* (GCG) untuk mendukung keberlanjutan koperasi

Partisipasi aktif anggota dari masyarakat desa dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas menjadi kunci sukses pengelolaan koperasi yang profesional dan inklusif

Koperasi Merah Putih yang bersifat multipihak berhasil membangun kolaborasi lintas sektor dan memperkuat modal sosial sebagai fondasi pengembangan ekonomi desa yang berkelanjutan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada tim KKN Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dedikasi, kerjasama, serta undangan untuk memberikan pelatihan Koperasi Merah Putih di Desa Dlanggu, Mojokerto, serta mengapresiasi pengurus desa dan seluruh warga Desa Dlanggu yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung setiap tahapan kegiatan, sehingga pelatihan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Basbeth, F. (2025). A shared value strategy in cooperative enterprises: The role of humanistic governance. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.24252/minds.v12i1.55798>
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Dasuki, R. E., & Lestari, A. (2019). Implementation of good corporate governance to the value of cooperative company. *Journal of Economic Empowerment Strategy*, 2(1), 50–63.
- Dasuki, R. E., & Lestari, A. (2019). Implementation of Good Corporate Governance to the value of cooperative company. *Journal of Economic Empowerment Strategy (JEES)*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.30740/jees.v2i1.33>
- Herdiyanti, H. (2024). Social capital in sociological perspective: A systematic review of empirical studies in Indonesia (2000–2024). *Society*, 12(2), 1066–1076. <https://doi.org/10.33019/society.v12i2.684>

- Herdiyanti, N. (2024). Social capital in sociological perspective: A systematic review of empirical studies in Indonesia (2000–2024). *Society: Jurnal Sosiologi dan Antropologi*, 12(1), 45–61.
- Hidayat, M. T., & Maqsudi, A. (2022). Pelatihan dan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan manajemen koperasi berbasis komunitas. *Jurnal Abdi Humaniora*, 4(2), 133–142.
- Indonesia, R. (2025). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2025.
- Istanti, E., Arimbi, D., Putri, D., Ekantoro, J., Maulana, N., Anwar, U. N., Leksono, F. Y., Maulana, A., Syahputra, G. P., & Agripina, A. (2023). Dampak keberadaan Wisata Renzo Edu Park terhadap peningkatan pendapatan dan perekonomian warga Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. *Jurnal ABDIMAS UBJ*, 6(3), 215–222.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Morgan, P. (2006). The concept of capacity. In *Study on capacity, change and performance* (pp. 1–20).
- Perkoperasian. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Pradana, D. A., Suharto, R., & Rahmawati, N. (2023). Evaluating community training sustainability through capacity building approach in rural Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani*, 7(2), 125–139. <https://doi.org/10.21009/jpmm.072.05>
- Smartklik. (2023). Pendampingan Koperasi oleh Untag Surabaya di Ngusikan, Jombang.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sururi, A., & Hasanah, B. (2022). Policy capacity and community empowerment as instruments of Indonesia's social development in the era of Covid-19 pandemic. *Jurnal Transformasi: Manajemen Pemerintahan*, 17(1), 65–78.
- Sururi, A., & Hasanah, B. (2025). Policy capacity and community empowerment as instruments of Indonesia's social development in the era of Covid-19 pandemic. *Transformasi: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 17(1), 87–101. <https://doi.org/10.33701/jtp.v17i1.4359>
- Tjahjono, A. F., Mashud, M., & Suaedi, F. (2022a). Implementation of social capital for multipurpose cooperative autonomy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35(1), 44. <https://doi.org/10.20473/mkp.v35i12022.44-57>
- Tjahjono, A. F., Mashud, M., & Suaedi, F. (2022b). Implementation of social capital for multipurpose cooperative autonomy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 35(1), 44–57. <https://doi.org/10.20473/mkp.v35i12022.44-57>

- Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. (2017). Dosen FISIP UnTag Surabaya FGD Pengembangan Modul Kewirausahaan Berbasis Koperasi.
- Veritia, V., & Arifianto, C. F. (2020). Bonding social capital's role in cooperative development based on volunteer through social innovation (Case study: Koperasi Hutan Jaya Lestari, South Konawe). *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(2), 117–126.
- Wulandari, S., & Hidayat, M. T. (2021). Strengthening institutional capacity through participatory training in village enterprises. *Jurnal Abdimas Humaniora*, 5(2), 98–109. <https://doi.org/10.21009/abdimashumaniora.052.03>
- Wuryani, E. (2020). Management of cooperatives in improving financial performance in East Java, Indonesia. In *Proceedings of the International Conference on Research and Academic Community Services* (pp. 356–361). <https://doi.org/10.2991/icracos-19.2020.75>